

2021

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
TINGKAT KUASA PENGGUNA BARANG
TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021**



**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BEKASI**



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BEKASI TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

1. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;

- 15) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 22) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.06/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.06/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 23) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327/KM.6/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana diubah terakhir melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
- 25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 26) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- 27) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1/MK.1/SJ.7/2020 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Sensus Barang Milik Negara Kementerian Keuangan;
- 28) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2/MK.1/SJ.7/2020 tentang Panduan Implementasi Mandat Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara;
- 29) Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocussing

Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L dalam Rangka Penanganan COVID-19.

- 30) Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-217/KN.1/2022 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun 2021 Kementerian Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan untuk CALBMN ini adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi.

C. Periode Laporan

Periode pelaporan untuk CALBMN ini adalah periode Semester III Tahun Anggaran 2021.

2. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, dan Pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna periode semesteran maupun tahunan kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Wilayah (UAPPB-W) atau Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang-Eselon I (UAPPB-E1) dan Kantor Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selaku Pengelola Barang.

Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

- A. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
- B. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi, yaitu (a) Tanah, (b) Peralatan dan Mesin, (c) Gedung dan Bangunan, (d) Jalan dan Jembatan, (e) Irigasi, (f) Jaringan, (g) Aset Tetap dalam Renovasi, (h) Aset Tetap Lainnya, dan (i) Konstruksi Dalam Pengerjaan. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi.
- C. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap, Laporan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2021 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
- D. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana

diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

- E. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-94/KMK.06/2013 tentang Modul Penyusutan sebagaimana telah disesuaikan dengan KMK-145/KMK.06/2014 tentang Perubahan atas KMK-94/KMK.06/2014.
- F. Kebijakan amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- G. Penerapan basis akrual dalam penyusunan laporan keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- H. Kebijakan penilaian kembali BMN sesuai dengan Perpres Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara.

3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Tahunan Tahun Anggaran 2021 Kementerian Keuangan merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN, Laporan BMN terdiri atas:

- A. Neraca;
- B. Laporan Barang Persediaan;
- C. Laporan Barang Pengguna (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
- D. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
- E. Laporan Aset Tak Berwujud;
- F. Laporan Barang Bersejarah;
- G. Laporan Penyusutan;
- H. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- I. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
- J. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
- K. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
- L. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal data BMN antara UAKPB dan UAKPA; dan

4. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2021

4.1. Saldo Awal BMN TA 2021

Nilai Posisi BMN di Neraca setelah disusutkan per 31 Desember 2020 menurut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi adalah sebesar Rp17.461.186.371,00 (tujuh belas miliar empat ratus enam puluh satu juta seratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

4.2. Ringkasan Mutasi BMN Tahunan Tahun Anggaran 2021

Mutasi BMN per Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar, jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebesar Rp100.604.456,00 (seratus juta enam ratus empat ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dan total mutasi bersih kurang sebesar Rp51.345.916,00 (lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Kode	Uraian	Saldo Awal (Rp) (01 Januari 2021)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	100.604.456	156.029.060	207.374.976	49.258.540
	Total	100.604.456	156.029.060	207.374.976	49.258.540

b. Tanah (2.01)

Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp12.420.555.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 2.576 m² (dua ribu lima ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan nilai sebesar Rp12.420.555.000,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan mutasi bersih tambah sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Mutasi tanah yaitu:

KODE	URAIAN	INTRAKOMPTABEL (Rp)
	Tidak Ada	0
	Total	0

Keseluruhan tanah digunakan sendiri oleh KPKNL Bekasi untuk menunjang penyelesaian tugas dan fungsi.

Tidak terdapat sengketa/permasalahan pada Barang Milik Negara berupa tanah milik KPKNL Bekasi dan telah bersertifikat dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang	Nama Barang	Luas (m2)	Dokumen Kepemilikan
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	98	SHP No. 70/Sepanjang Jaya a.n Pemerintah R.I c.q Kemenkeu
2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	98	SHP No. 68/Sepanjang Jaya a.n Pemerintah R.I c.q Kemenkeu

2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	225	SHGB No. 1565 / Jakasampurna a.n Bank Indonesia c.q Bank Aken
2010102003	Tanah Bangunan Gudang	155	SHP No. 69/Sepanjang Jaya a.n Pemerintah R.I c.q Kemenkeu
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2.000	SHP No. 34/Margahayu a.n Pemerintah R.I c.q Kemenkeu

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp4.454.445.419,00 (empat miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus sembilan belas rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebesar Rp4.453.559.755,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) dengan mutasi bersih tambah Rp885.664,00.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Saldo Alat Besar pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 total jumlah sebesar 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp329.600.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebesar 2 (dua) unit dan dengan nilai Rp329.600.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), dengan mutasi bersih tambah selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00

Mutasi Alat Besar sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	Tidak Ada	0	0
TOTAL		0	0

Kelompok barang Alat Besar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Alat Angkutan (3.02)

Saldo Alat Angkutan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 total jumlah barang sebesar 8 (delapan) unit dengan nilai sebesar Rp1.013.030.429,00 (satu miliar tiga belas juta tiga puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah barang sebesar 9 (sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp1.027.990.429,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan),

dengan total mutasi bersih kurang selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar 1 (satu) unit dengan nilai Rp14.960.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu).

Mutasi Alat Angkutan sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	14.960.000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(14.960.000)	0
TOTAL		(14.960.000)	14.960.000

Kelompok barang Alat Angkutan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 1 (satu) unit 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp14.960.000,00 (empat belas juta sembilan ratus enam puluh ribu).

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 dengan total jumlah sebesar 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp11.403.828,00 (sebelas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 4 (empat) unit dengan nilai sebesar Rp11.403.828,00 (sebelas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah), dengan total mutasi bersih tambah selama periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 dengan nilai sebesar 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	Tidak Ada Transaksi	0	0
TOTAL		0	0

Kelompok barang Alat Bengkel dan Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

4) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun 2021 per 31 Desember 2021 dengan jumlah total sebesar 688 (enam ratus delapan puluh delapan) unit dengan nilai sebesar Rp1.765.479.542,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh sembilan ribu lima ratus empat puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 606 (enam ratus sembilan puluh satu) unit dengan nilai Rp1.581.580.716,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah). dengan total mutasi tambah Tahunan Tahun Anggaran 2021 sebanyak 86 (delapan puluh enam) unit dengan nilai sebesar Rp190.602.826,00 (seratus sembilan

puluh juta enam ratus dua ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 3 (tiga) unit dengan nilai sebesar Rp6.704.000,00 (enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

Mutasi Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Pembelian	55.484.000	0
102	Transfer Masuk	135.118.826	
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	6.704.000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(6.704.000)	0
TOTAL		183.898.826	6.704.000

Kelompok barang Alat Kantor dan Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 2 (dua) unit dengan nilai sebesar Rp6.704.000,00 (enam juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

5) Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (3.06)

Saldo Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 total jumlah 25 (dua puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp178.625.459,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2021 dengan jumlah 24 (dua puluh empat) unit dengan nilai sebesar Rp187.720.459,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) dengan total mutasi tambah sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp6.105.000,00 (enam juta seratus lima ribu), mutasi kurang dengan total jumlah 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Pembelian	6.105.000	
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	15.200.000
401	Penghentian Aset Dari Penggunaan	(15.200.000)	0
TOTAL		(9.095.000)	15.200.000

Mutasi Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagai berikut:

Kelompok barang Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah).

6) Komputer Unit dan Peralatan Komputer (3.10)

Saldo Komputer Unit dan Peralatan Komputer pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 dengan jumlah sebesar 70 (tujuh puluh) unit dengan nilai sebesar Rp1.155.482.161,00 (satu miliar seratus lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal per 01 Januari 2021 dengan jumlah sebesar 85 (delapan puluh lima) unit dengan nilai sebesar Rp1.314.440.323,00 (satu miliar tiga ratus empat belas juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah) dengan total mutasi tambah sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dan total mutasi kurang sebanyak 16 (enam belas) unit sebesar Rp162.358.162,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah)

Mutasi Komputer Unit dan Peralatan Komputer sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
101	Pembelian	3.400.000	0
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	162.358.162
401	Penghentian Aset dari Penggunaan	(162.358.162)	0
TOTAL		(158.958.162)	162.358.162

Kelompok barang Alat Kedokteran dan Kesehatan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sebanyak 16 (enam belas) unit dengan nilai sebesar Rp162.358.162,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh dua rupiah).

7) Sumur (3.13)

Saldo Sumur pada pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun 2021 per 31 Desember 2021 dengan jumlah sebesar 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp4.994.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan jumlah sebesar 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp4.994.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dengan total mutasi sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Mutasi Sumur sebagai berikut:

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	Tidak Ada Transaksi	0	0
TOTAL		0	0

8) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.908.640.580,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi per 31 Desember 2021 sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp5.419.866.640,00 (lima miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.621.865.250,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), dan mutasi bersih tambah sebesar Rp798.001.390,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung (4.01)

Saldo Bangunan Gedung pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp5.419.866.640,00 (lima miliar empat ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus empat puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebesar sebanyak 6 (enam) unit dengan nilai sebesar Rp4.621.865.250,00 (empat miliar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah), mutasi masuk sebanyak 1 (satu) unit sebesar Rp1.596.002.780,00 (satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan mutasi keluar sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp798.001.390,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

. Adapun mutasi bangunan gedung adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
105	Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	798.001.390	0
204	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	798.001.390	0
305	Koreksi Pencatatan	(798.001.390)	0
	TOTAL	798.001.390	0

Kelompok barang Bangunan Gedung yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.108.925.629,00 (satu miliar seratus delapan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).

e. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian barang sebagai berikut :

1) Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan

Saldo Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) disebabkan Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan dijadikan Aset Definitif berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya dengan nilai sebesar Rp798.001.390,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 senilai Rp34.570.600,00 (tiga puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) dengan mutasi tambah senilai Rp763.430.790,00 (tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) dan dijadikan Aset Definitif berupa Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan Lainnya.

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
105	Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	798.001.390	0
305	Koreksi Pencatatan	(798.001.390)	0
TOTAL		0	0

f. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan per 31 Desember 2021 adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan mutasi bersih sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 sejumlah 8 (delapan) unit dengan nilai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sejumlah 8 (delapan) unit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan mutasi bersih sebanyak 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah) Adapun mutasi bahan perpustakaan sebagai berikut:

Kode	Uraian	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
	Tidak Ada Data	0	0
	TOTAL	0	0

Kelompok barang bahan perpustakaan yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Semester II Tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

g. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp199.222.162,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebanyak 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi masuk sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp199.222.162,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan mutasi keluar sebanyak 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

1) BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

Saldo BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp199.222.162,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal 01 Januari 2021 sebanyak 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah), mutasi masuk sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebesar Rp199.222.162,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah) dan mutasi keluar sebanyak 0 (nol) unit sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2) Rincian mutasi BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah

per bidang barang adalah sebagai berikut :

Kode	Uraian Jenis Transaksi	Intrakomtabel (Rp)	Ekstrakomtabel (Rp)
188	Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0	199.222.162
401	Penghentian Aset dari Penggunaan	(199.222.162)	0
	TOTAL	(199.222.162)	199.222.162

Akumulasi penyusutan BMN Yang Dihentikan Penggunaannya dari Operasional Pemerintah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi periode

Semester II tahun 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp199.222.162,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus enam puluh dua rupiah).

5. INFORMASI BMN LAINNYA

5.1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara laporan gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel selama 5 (lima) periode laporan terakhir disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN pada Laporan Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahunan TA 2017	16.414.507.314	-	-
2	Tahunan TA 2018	16.780.612.446	366.105.132	2,23%
3	Tahunan TA 2019	21.069.738.696	4.289.126.250	25,56%
4	Tahunan TA 2020	21.502.150.005	432.411.309	2,05%
5	Tahunan TA 2021	22.500.259.221	998.109.216	4,64%

5.2. Penerimaan Negara yang berasal dari Pengelolaan BMN

Jumlah Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta pendapatan dari Penjualan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp828.000,00 (delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan
1.	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	828.000
Total			828.000

5.3. Dokumen Sumber Tanah

Terdapat total tanah sebanyak 5 NUP dengan luas bidang tanah total sebesar 2.576 m². Adapun rincian data tersebut yaitu:

No	Unit Kerja	Bersertifikat		Belum Bersertifikat		Total		% Sertifikat	% Tidak bersertifikat
		NUP	Luas (m ²)	NUP	Luas (m ²)	NUP	Luas (m ²)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	KPKNL Bekasi	4	2.351	1	225	5	2.576	80	20
Total		4	2.351	1	225	5	2.576	80	20

Adapun rincian data bersertifikat yaitu:

No	Unit Kerja	Bersertifikat a.n.					
		Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga		Kementerian/ Lembaga		Pihak Ketiga	
		NUP	Luas (m ²)	NUP	Luas (m ²)	NUP	Luas (m ²)
1	KPKNL Bekasi	4	2.351	0	0	1	225
JUMLAH		4	2.351	0	0	1	225

5.4. BMN dalam kondisi hilang

Per 31 Desember 2021, terdapat 5 (lima) unit BMN selain tanah dan/atau bangunan yang

tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa inventaris dalam kondisi hilang yang akan diproses penghapusannya untuk tahun 2022. Adapun rincian data tersebut yaitu :

No.	Nama Barang	Jumlah NUP	Total Nilai Perolehan	Keterangan
1	P.C Unit	5	89.785.000	BMN dalam kondisi hilang akibat pencurian, akan dilakukan penghapusan pada tahun 2022

5.5. BMN Bersengketa

BMN bersengketa di pengadilan merupakan BMN yang didaftarkan bersengketa di pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN, PTTUN maupun Mahkamah Agung. Pada KPKNL Bekasi tidak terdapat BMN Sengketa pada Tahunan Tahun Anggaran 2021.

6. INFORMASI PENGELOLAAN BMN

6.1 Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai dan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaan pada KPKNL Bekasi Tahunan Tahun Anggaran 2021 per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian BMN	Jumlah NUP	Nilai Perolehan BMN
1	Tanah	5	12.420.555.000
2	Bangunan	6	5.419.866.640
3	BMN Selain Tanah Bangunan yang memiliki bukti kepemilikan	9	1.027.990.429
4	BMN Selain Tanah Bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan	818	3.631.847.152

6.2 Pengelolaan BMN

Pengelolaan BMN Tahunan Tahun Anggaran 2021

No.	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Penghapusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	-	-	1	-	1
2	Dalam proses pengajuan	-	-	-	-	-

	permohonan ke Pengelola Barang					
3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang					
	a. Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b. Ditolak	-	-	-	-	-
	c. Disetujui	-	-	-	-	-
5	Dalam proses tindaklanjut Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang	-	-	2	-	2
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	-	1	-	-	1
7	Tindaklanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	-	1	-	-	1
8	Selesai serah terima	-	1	-	-	1

7. PERMASALAHAN PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN BMN

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan penatausahaan BMN.

Bekasi, 17 Januari 2022
 Kuasa Pengguna Barang
 Kepala KPKNL Bekasi



Dimanti Jaya
 NIP. 196411161985031002